

TESIS

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG KURATOR DALAM PENGURUSAN
DAN PEMBERESAN *BOEDEL PAILIT* YANG TIDAK MENERAPKAN
PRINSIP INDEPEDENSI**



OLEH:

INDRA RACHMADI

NIM. 032114253073

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

TESIS

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG KURATOR DALAM PENGURUSAN
DAN PEMBERESAN *BOEDEL PAILIT* YANG TIDAK MENERAPKAN
PRINSIP INDEPEDENSI**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

**INDRA RACHMADI
NIM. 032114253073**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 29 November 2022

Dosen Pembimbing Utama:

Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N.

NIP. 197304062003121002

Dosen Pembimbing Kedua:

Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.

NIK. 199009292022013101

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, pada tanggal 16 Desember 2022 TIM PENGUJI TESIS:

TIM PENGUJI TESIS:

Ketua : Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 198004172005011005

Anggota : 1. Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

NIP. 197304062003121002

2. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.

NIK. 199009292022013101

3. Gianto Al Imron, S.H., M.H

NIP. 197206101998021001

4. Hanum Rahmaniar Helmi, S.H., M.H.

NIP. 198905102019032024

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Rachmadi.
NIM : 032114253073

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 15 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Indra Rachmadi

NIM. 032114253073

MOTTO

**SETIAP PROSES PEMBELAJARAN DIPERKENANKAN UNTUK
MELAKUKAN KESALAHAN AKAN TETAPI TIDAK
DIPERKENANKAN UNTUK BERBOHONG
“ad astra per aspera”**

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang penyalahgunaan wewenang kurator dalam pengurusan dan pemberesan boedel pailit yang tidak menerapkan Prinsip indepedensi. Rumusan masalah yang terdapat dalam tesis ini yaitu kedudukan Apa bentuk Tanggungjawab kurator yang tidak menerapkan prinsip indepedensi dalam pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit dan Apa Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan kurator yang menyalahgunakan wewenang dalam pengurusan dan pemberesan Boedel Pailit yang tidak independen. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Prinsip independensi mempunyai makna prinsip kebebasan, mandiri dan merdeka dalam melakukan tugas dan jabatannya serta tidak diperbolehkan untuk diintervensi baik oleh debitor dan kreditor serta pihak manapun, apabila terdapat kesalahan akibat perbuatan dan kesalahannya, maka kurator bertanggungjawab secara pribadi baik secara perdata ataupun pidana. Kemudian Upaya Pihak Yang Dirugikan Akibat Tindakan Kurator Dalam Melakukan Pengurusan Dan Pemberesan Boedel Pailit Yang Tidak Independen sehingga berpotensi mengalami kerugian maka bisa melakukan penuntutan kerugian, upaya renvoi prosedur, bantahan terhadap piutang yang tidak sesuai dengan tagihan, serta mengajukan gugatan lain-lain terhadap kurator.

Kata Kunci: Kurator; Harta Pailit; Prinsip Indepedensi; Renvoi Prosedur; Gugatan lain-lain

ABSTRACT

This thesis discusses the abuse of the curator's authority in the management and settlement of bankrupt boedels that do not apply the principle of independence. The formulation of the problem contained in this thesis is the position of what is the form of responsibility of the curator who does not apply the principle of independence in the management and settlement of bankrupt boedels and what efforts can be made by parties who feel disadvantaged as a result of the actions of curators who abuse their authority in the management and settlement of bankrupt boedels that are not independent. The research method used is normative research method with statutory, conceptual and case approaches. The results of the study show that the principle of independence has the meaning of the principle of freedom, being independent and independent in carrying out their duties and positions and is not allowed to intervene either by debtors and creditors as well as any party, if there is an error as a result of his actions and mistakes, then the curator is personally responsible both civilly or criminal. Then the efforts of parties who are harmed as a result of the actions of the curator in carrying out the management and settlement of Bankruptcy Boedel which are not independent so that they have the potential to suffer losses can carry out lawsuits against the curator.

Keywords: *Bankruptcy Assets; Independence Principle; Renvoi Procedure; Other lawsuits.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan baik. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam proses penulisan Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik dalam bentuk bimbingan maupun dukungan moral. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis baik selama masa kuliah maupun pada saat pengerjaan Tesis ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. dan Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing, terima kasih banyak telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah kesibukan beliau dalam memberikan bimbingan dan kritik, nasehat, semangat, serta arahan demi kesempurnaan tesis ini.
2. Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M. dan Ibu Hanum Rahmaniar Helmi, S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta saran dalam penyempurnaan Proposal Tesis;
3. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. dan Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta saran dalam penyempurnaan Proposal Tesis;
4. Dr Ghansam Anand, S.H., M.kn. selaku dosen yang telah memberikan waktu dan dukungan dalam hal akademik dalam diskusi hingga Tesis ini selesai;

5. Para Guru Besar, Dosen Pengajar dan Staff Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas segala ilmu serta bantuannya selama masa perkuliahan penulis;
6. Kedua orang tua serta seluruh keluarga penulis yang tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis baik selama masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai;
7. Kantor Hukum Nur Yahya & Partners selaku Senior dan Dosen Pembimbing saya pada saat Sarjana Hukum, telah memberikan waktu untuk melakukan diskusi pada saat di kantor
8. Kantor Hukum YSR & Partners telah memberikan fasilitas pinjaman buku ataupun fasilitas dalam proses mencari keilmuan;
9. Para Panitia PKPA UWKS khususnya Mas GP (Djupri, S.E) yang telah memberikan ajaran untuk menata format tesis yang rapi;
10. Para teman-teman seangkatan Magister Kenotariatan 2021 yang senantiasa berbagi ilmu, pengalaman, serta penambahan relasi.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang senantiasa membantu penulis selama selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan dan dapat dikatakan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat meningkatkan kualitas penulisan penulis. Penulis mengharapkan agar Tesis ini dapat bermanfaat dan menambah

wawasan baik bagi rekan mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya serta dalam pembentukan RUU Kepailitan kedepannya. Sekian, terima kasih

Surabaya, 21 Desember 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

Indra Rachmadi

NIM. 032114253073

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Staatsblad tahun 1847 Nomor 23)

Herziene Inlandsch Reglemen (HIR) S.1848 -16 jis S.1849-63, S.1929-559/496, S.1941-44.

Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*) S.1905-217 jo, S.1906-348.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/KMA/SK/I/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/I/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor
01/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor
939/Pid.B/2014/PN.Sby

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 231
K/PID/2015

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 13/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Jks-Pst

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1279 K/Pid/2019

DAFTAR SINGKATAN

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Balai Peninggalan Harta (BHP)

Hakim Pengawas (Hawas)

Peninjauan Kembali (PK)

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)

Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI)

Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.6.1. Tipe Penelitian.....	12
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	13
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	15
1.7. Sistematika Penulisan	16
BAB II PRINSIP INDEPEDENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN BOEDEL PAILIT	18
2.1. Fungsi Dan Peran Kurator Dalam Melakukan Pengurusan Dan Pemberesan Boedel Pailit.....	18

2.2.	Implementasi Prinsip Independensi Kurator Dalam Menjalankan Fungsinya	21
2.3.	Tanggungjawab Hukum Secara Pribadi.....	29
2.3.1.	Tanggungjawab Secara Perdata.....	36
2.3.2.	Tanggungjawab Secara Pidana.....	40
BAB III UPAYA PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT TINDAKAN KURATOR DALAM MELAKUKAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN BOEDEL PAILIT YANG TIDAK INDEPENDEN.....		
		47
3.1.	Potensi Kerugian Para Pihak Akibat Kurator Yang Tidak Independen	47
3.1.1	Potensi Kerugian Kreditor.....	50
3.1.2.	Potensi Kerugian Debitor	51
3.1.3.	Potensi Kerugian Pihak Lain	53
3.2.	Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Akibat Kurator Yang Tidak Menerapkan Prinsip Independensi Dalam Melakukan Pengurusan Dan Pemberesan Boedel Pailit	54
3.2.1	Penuntutan Kerugian Oleh Para Pihak Yang Disebabkan Kurator.....	56
3.2.2	Upaya Renvoi Prosedur dan Bantahan oleh Para Pihak berdasarkan Undang-Undang Kepailitan	62
3.2.3	Upaya Penggantian kurator yang tidak Independen oleh Para Pihak berdasarkan Undang-undang Kepailitan	70
3.3.	Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remidium atas Tindakan Kurator yang tidak menerapkan Prinsip Independensi	80
3.4.	Upaya Gugatan Lain Lain (Perbuatan Melanggar Hukum) Terhadap Kurator oleh Debitor maupun Kreditor	85
3.5.	Ratio Decidendi Putusan Nomor 231K/PID/2015	92
BAB IV PENUTUP		95
4.1.	Kesimpulan	95
4.2.	Saran.....	95
DAFTAR BACAAN		...